



Proyek Sampah Jadi Listrik di DIY Beroperasi 2027

JOGJA—Proyek *waste to energy* (WTE) berupa pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk mengurai masalah sampah perkotaan bakal mulai beroperasi di DIY pada 2027 mendatang.

Akbar Evandio, Ariq Fajar & Kiki Lukmanul Hakim
redaksi@jibinews.co

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi

► Pemilihan TPA Piyungan sebagai lokasi PSEL sangat tepat karena sejak lama kawasan tersebut menampung sampah regional DIY.

► Total investasi untuk mentransformasi 343 TPA sesuai konsep *waste to energy* mencapai Rp300 triliun.

Nugroho, menjelaskan fasilitas WTE akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare. Setiap hari, fasilitas itu

dirancang mampu mengolah sedikitnya 1.000 ton sampah dari Jogja, Sleman, dan Bantul. "Pelaksanaannya akan dikelola oleh Badan Usaha Pengelolaan Persampahan [BUPP] dan didanai oleh Danantara. Saat ini masih dalam tahap perencanaan yang didampingi oleh KLH serta Kemendagri," katanya, Jumat (12/9).

Menurut Bambang, pemilihan TPA Piyungan sebagai lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sangat tepat karena sejak lama kawasan tersebut menampung sampah regional DIY. Dengan kapasitas yang kian terbatas,

kehadiran PSEL dipandang sebagai solusi jangka panjang. "Harapannya, beban TPA Piyungan bisa berkurang karena sampah tidak lagi hanya ditimbun, melainkan diolah menjadi energi listrik yang bermanfaat," ujarnya.

Tahapan pembangunan dibagi dalam tiga fase. Tahap pertama berlangsung sepanjang 2025, berfokus pada persiapan teknis dan administrasi. Tahap kedua dijadwalkan pada pertengahan 2026, berupa peletakan batu pertama atau *groundbreaking* infrastruktur PSEL.

► Halaman 10



Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9).

Antara/Aprilio Akbar

Proyek Sampah...

Tahap ketiga ditargetkan rampung pada 2027 sehingga fasilitas ini bisa segera operasional. "Kalau semua berjalan sesuai rencana, pada 2027 PSEL sudah bisa menghasilkan energi listrik dari sampah," tambah Bambang.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena, mengatakan tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). "Masih dalam pembahasan dengan KLH terkait kesiapan dan kelayakan program. Pembahasan ini paralel dengan penerbitan Perpres pengganti Perpres No.35/2018. Saat ini pemerintah kabupaten dan kota fokus memenuhi prasyarat yang diperlukan," ujar Aris.

Menurut Aris, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum program ini berjalan. Beberapa di antaranya mencakup kecukupan volume sampah per hari, kadar kalori dalam sampah, serta aspek teknis lain yang menjadi penilaian kelayakan.

Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan fasilitas pengolahan WTE ini berbeda dengan TPS3R yang selama ini sudah ada di DIY. Perbedaan mencakup aspek teknologi hingga skema pembiayaan. "Nanti dari sisi teknologi beda, dari sisi pembiayaan juga beda. Semua anggarannya dari Pemerintah Pusat," ungkap Kusno.

Ia menambahkan peran pemerintah daerah dalam program ini lebih terbatas. Pemd hanya bertanggung jawab pada penyediaan lahan, sosialisasi, serta pengangkutan sampah.

Dibiayai Danantara

Proyek WTE digadagadag akan diterapkan di 33 provinsi untuk mengurai masalah sampah perkotaan. Pemd dimina menyediakan lahan dan sampah untuk 20

tahun ke depan. Dana investasi besar ini bersumber dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan semua proyek WTE di bawah koordinasinya akan menggunakan pembiayaan dari Danantara. "Di Danantara semua [pembiayaan]. Yang saya pegang seperti Kopdes, WTE itu tidak pakai APBN," ujarnya kepada *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI)* di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).

Saat ini, publik menanti revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam revisi tersebut, pemerintah tak akan menyertakan *tipping fee* atau biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah (pmda) kepada pengolahan sampah.

Sebagai gantinya, pmda harus menyediakan lahan untuk PLTsa dan ketersediaan sampah sebagai bahan baku (*feedstock*). Ketersediaan sampah itu harus terjamin setidaknya untuk 20 tahun ke depan.

Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut PLTsa bisa menjadi solusi untuk mengurai sampah di perkotaan dan pasokan energi hijau pun bertambah. Pasalnya, sampah menjadi permasalahan di kota besar. Total timbunan sampah secara nasional mencapai 33,8 juta ton per tahun. Sementara itu, sampah yang sudah dikelola hanya sekitar 60%, sedangkan 40% sisanya masih dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia menyebut proyek *waste to energy* atau konversi sampah menjadi listrik masih

dalam tahap pembahasan teknis dan belum sampai pada penugasan resmi kepada PLN.

Proyek PLTsa di 33 provinsi menjadi bagian dari upaya pengendalian sampah nasional untuk mencapai target 100% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Staf pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, menyortir sejumlah skema dan asumsi dasar dalam proyek WTE. Menurutnya, tanpa perubahan fundamental dalam tata kelola sampah, proyek-proyek ini berisiko besar secara ekonomi dan berpotensi membebani keuangan negara serta PLN. "Tata kelola dan persepsi perlakuan terhadap sampah tidak sama. Sampah adalah produk akhir," ujarnya, saat dihubungi *JIBI*, Jumat (11/9).

Ia menjelaskan dalam sistem yang ideal, tanggung jawab pengelolaan sampah seharusnya berada di tangan pmda. Namun, masalah utama muncul ketika beban pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dibebankan kepada pengembang proyek WTE.

"Jangan sampai pengembangan atau pengelolaan sampah sampai TPA menjadi beban pengembang. Itu *costly* dan secara ekonomis tidak mungkin. Apalagi kalau dikonversi menjadi listrik. Dengan harga listrik saat ini, pengembangnya akan rugi."

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan biaya pengembangan teknologi PLTsa relatif lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Pengembangan PLTsa membutuhkan pembiayaan US\$5 juta hingga US\$13 juta, tergantung lokasi.

(*JIBI/Bisnis.com*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005